

Peran *News Corporations* dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2003)

Retnachrista RS

Lulusan Si Artisan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Media plays significant role, in the era of globalization, including in influencing a foreign policy decision making process of a state. With the ability of shaping public opinion, the media is used by the government to observe the public's expectation and responses to the policy which they try to make. This paper attempts to seek the US media influence towards foreign policy making, especially News Corporations, a big media corporation owned by a great media mogul Rupert Murdoch in President George Bush' decision to invade Iraq in March 2003.

Keyword: Media, Public Opinion, Foreign Policy Decision Making, Iraq Invasion.

Pendahuluan

Sejak serangan teroris ke Gedung World Trade Center dan Pentagon pada 11 September 2001, arus utama isu internasional berubah total. Ancaman teroris yang sebelumnya tidak begitu populer, tiba-tiba saja menjadi agenda utama Amerika Serikat (AS) yang menjadi korban dari serangan itu. Beberapa hari setelah tragedi itu, AS memutuskan menyerang Afganistan yang diduga menjadi tempat persembunyian Al Qaeda, organisasi yang dituduh sebagai dalang serangan tersebut. Akhirnya, pada 20 September 2001, di depan Kongres, Bush secara resmi mendeklarasikan perang melawan terorisme global yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Dua tahun setelah invasi ke Afghanistan, Bush mengalihkan serangan ke Irak. Irak tak hanya dianggap musuh, tetapi juga ditetapkan sebagai sasaran yang harus dilenyapkan karena dukungannya terhadap terorisme global. Penetapan ini pun tak lepas dari dugaan bahwa Presiden Irak Saddam Hussein mengembangkan senjata pemusnah

masal yang mengancam keamanan dunia internasional, terutama AS. Bukan rahasia bahwa Saddam dan AS sudah saling membenci sejak Perang Teluk pada awal 1990-an.

Pidato Bush di Kongres pada 28 Januari 2003 sama kin menegaskan hal itu. Di hadapan anggota Kongres, Bush membeberkan bukti-bukti pengembangan senjata pemusnah masal Irak. Dari laporan intelijen yang menurut Bush sangat terpercaya dan tak terbantahkan, Irak memiliki senjata pemusnah masal yang bisa disiapkan dalam waktu 45 menit. Selain itu, Menteri Luar Negeri Coffin Powell juga menunjukkan pada PBB berkas setebal 19 halaman yang diperoleh sejak Perang Teluk yang menguatkan tuduhan pengembangan senjata pemusnah masal, termasuk bukti kepemilikan pesawat tanpa awak yang dapat terbang sejauh 500 km (Gray, 2006: 26). PBB lantas menunjuk tim inspeksi yang dipimpin Hans Blix untuk membuktikan tuduhan Bush. Setelah berulang kali melakukan pemeriksaan ke Irak, tim ini ternyata tidak menemukan tanda-tanda adanya senjata pemusnah masal yang dimaksud AS. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat Bush untuk menginvasi AS. Ditegaskan oleh Kepala Badan Pengkajian Pentagon, Richard Perle, AS akan tetap menyerang Irak meski tim Blix tidak menemukan senjata tersebut (Mahally, 2003: 19-22).

Sebelum invasi, pemerintahan Bush mengklaim bahwa Muhammad Atta, terdakwa pemimpin serangan 11 September bertemu dengan pejabat intelijen Irak di Praha, Ceko. Pertemuan itu digunakan Bush sebagai bukti bahwa ada keterkaitan antara serangan yang didalangi Al Qaida dengan Saddam. Presiden Ceko menyangkal adanya pertemuan tersebut, namun pejabat pemerintahan AS tetap memanfaatkan hal itu sebagai alasan untuk menyerang Irak (Mahally, 2003: 97).

Maka, pada 20 Maret 2003, secara resmi Amerika Serikat melancarkan agresi militer ke Irak sebagai bagian dari agenda perang global melawan terorisme. Dalam kurun waktu tak lebih dari 30 hari, Baghdad jatuh ke tangan AS dan rezim diktator Saddam Hussein hancur dengan terbunuhnya beberapa petinggi Partai Baath dan pemerintahan. Namun hingga sekarang, senjata pemusnah masal yang dituduhkan AS itu belum terbukti keberadaannya.

Kebijakan Bush menginvasi Irak tak dapat dilepaskan dari peran beberapa media korporat besar yang sejak peristiwa 11 September menjadi aktif menyoroti perkembangan di tiap negara dunia ketiga, terutama yang dikategorikan Bush sebagai *axis of evil*. Sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dipastikan kebenarannya, media memiliki kekuatan untuk memengaruhi pembuatan keputusan

kebijakan luar negeri suatu negara. Patrick O'Heffernan dalam *Mass Media and American Foreign Policy: Insider Perspective on Global Journalism and the Foreign Policy Process* (Norwood, NJ.: Ablex Publishing Coprs., 1991) menyebutkan bahwa sebagai penyedia informasi yang relatif cepat dan akurat, media bisa menjadi sumber pertimbangan utama seorang aktor dalam mengambil kebijakan luar negeri, terutama di AS (Graber, 2000: 292-303).

Pada kasus invasi ke Irak, Bush menggunakan informasi yang berhasil dihimpun jaringan berita *News Corporations* (selanjutnya disingkat *News Corps*) milik Rupert Murdoch dan disebarluaskan melalui program berita Fox News. Dalam invasi kontroversial yang tidak direstui PBB ini, terdapat indikasi bahwa *News Corps* adalah jaringan media yang paling berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri Presiden Bush.

Berangkat dari asumsi ini, menarik untuk mengetahui lebih jauh peran jaringan media raksasa itu dalam pembuatan kebijakan luar negeri Bush, khususnya dalam invasi ke Irak, Maret 2003. Di sini, penulis berargumen bahwa jaringan berita *News Corps* berperan sebagai pembentuk opini publik dengan menyediakan informasi yang berisi dukungan moral dan justifikasi bagi rencana invasi ke Irak. Opini publik yang tercipta ini kemudian menjadi pertimbangan elit dalam merumuskan kebijakan luar negeri berupa serangan militer ke Irak.

Media dan Opini Publik dalam Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

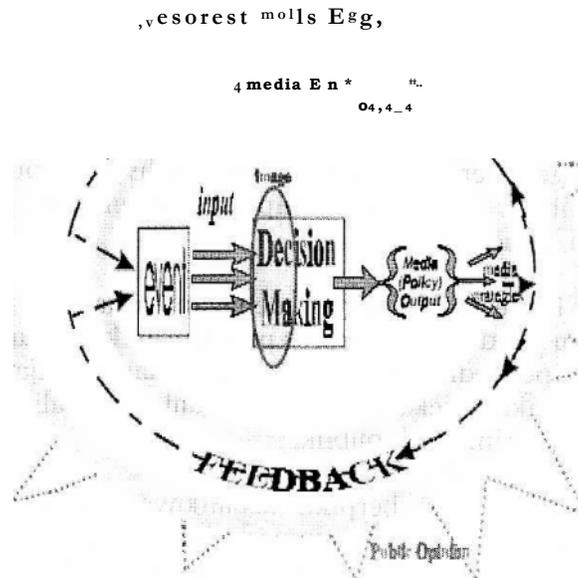
Ada tiga model yang dapat digunakan untuk melihat peran media dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pertama, dikemukakan Glenn Snyder bahwa pembuat keputusan bertindak sebagai respons terhadap kondisi dan faktor-faktor yang terjadi di luar lingkungan internal pemerintah tempat mereka terlibat. *Setting* internal dideskripsikan sebagai lingkungan manusia yang terdiri dari kultur budaya dan populasi, yang secara otomatis di dalamnya termasuk opini publik (Snyder *et.al.*, 1969: 201-203, dalam Naveh, 2006). Dalam hal ini, media bisa dikategorikan sebagai komponen terbesar dari lingkungan internal kebijakan luar negeri. Media dapat digambarkan sebagai alat yang menunjukkan interpretasi dan ekspektasi aktor non-pemerintah dari berbagai kelompok masyarakat, sebagaimana dapat pula digunakan sebagai alat untuk menyosialisasikan kebijakan dan agenda oleh pemerintah.

Michael Brecher mengembangkan model yang lebih detail mengenai kerangka kerja media dalam proses perumusan kebijakan dengan menyebut media sebagai "jaringan komunikasi dalam sistem politik yang memungkinkan aliran informasi tentang lingkungan operasional pada elit" (Brecher, 1972: 183-207, dalam Naveh, 2006). Brecher dan Snyder menyatakan media sebagai komponen internal dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, saluran untuk mengirim pesan dari lingkungan diplomatis-politis yang aman kepada pemimpin. Beberapa perspektif menegaskan bahwa media sebagai bagian dari lingkungan internasional dapat memengaruhi kebijakan dan melihat televisi dan pers sebagai komponen sumber, dan variabel *input* yang menggerakkan proses pengambilan keputusan sebagaimana variabel lain seperti struktur *power regional*, kapabilitas ekonomi aktor lain, dan sebagainya.

Singkatnya, kata Naveh, proses perumusan kebijakan luar negeri dilakukan dalam lingkungan yang sebagian diciptakan oleh media. Peran media dalam lingkungan ini ditentukan oleh rezim komunikasi politik negara, kebijakan komunikasi pemerintah, struktur ekonomi-politik, dan saluran komunikasi khusus yang relevan dengan fungsi media. Atmosfer yang diciptakan media ini merefleksikan even kebijakan luar negeri melalui perspektif *agenda-setting*, memengaruhi pembuat kebijakan, dan mendorong mereka untuk merespon melalui media, dengan karakteristik spesifik (Naveh, 2006: to).

Proses keterlibatan media sangat kompleks, namun bisa disederhanakan menjadi dua hal. Pertama, media sebagai sumber input bagi pembuatan keputusan, dan kedua, media sebagai lingkungan yang harus disesuaikan dan dipertimbangkan pemimpin dalam membuat kebijakan. Pemimpin dan pembuat kebijakan luar negeri memang dipengaruhi media. Mereka mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi dalam sistem internasional dari pers, dan berbagai pesan yang masuk dari arena percaturan politik global melalui saluran komunikasi publik. Dalam tataran ini, media bertindak sebagai sumber, bagian dari lingkungan *input* proses perumusan kebijakan yang menyediakan informasi dan data bagi elit pemimpin.

Secara sederhana, peran media dalam pembuatan kebijakan luar negeri digambarkan oleh bagan berikut:



Sumber:

Chanana Naueh, The Role of The Media in Foreign Policy Decision Making Process: A Theoretical Framework, Conflict and Communication Online Vol.i No.2, 2002

Sementara, Anindyo J. Majumdar dan Shibashis Chatterjee secara khusus memberikan ulasan mendalam mengenai peran media dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS. Ada tiga premis utama dari Majumdar dan Chatterjee. Pertama, elit pembuat kebijakan luar negeri tetap menarik bagi media. Kedua, media dan perumusan kebijakan terpaku pada hubungan mutual yang eksploitatif. Ketiga, media dan pemerintah bisa berjalan search and sebaliknya, bisa berlawanan selama proses perumusan kebijakan luar negeri (Majumdar dan Chatterjee, 2004: 356).

Mengutip Chomsky (1988;1991;1998), dinyatakan bahwa media AS dikendalikan oleh kekuatan modal dan pemerintah. Oleh karena itu, ada lima kendala utama yang selalu dimiliki media AS, yaitu terkonsentrasi pada isu tertentu, terjerat konglomerasi (media korporat), didanai dan disetir pemerintah dan bisnis, mendapat tekanan dari sayap kanan (konservatif), dan tergantung pada sumber berita yang terbatas. Media-media *mainstream* adalah kepanjangan tangan dari propaganda negara, dan kebebasan pers menjadi bagian

dari sistem mekanisme indoktrinasi agen untuk memanipulasi opini publik (Majumdar dan Chatterjee, 2004: 356).

Media baru diakui memiliki kekuatan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri sejak 1990, dengan munculnya 'CNN Effect', yang merupakan keberhasilan CNN membentuk opini publik selama peliputannya dalam Perang Teluk. Untuk pertama kalinya, CNN menyediakan penggambaran melalui sudut pandang berbeda dan menyuguhkan sesuatu yang dapat didengar sekaligus dilihat oleh pemirsa. George Kennan mengatakan bahwa keputusan yang monumental dibuat oleh impuls-impuls populer yang disetir oleh industri televisi komersial.

Sementara, O'Heffernan (1993) menggambarkan media sebagai pemegang peran ganda dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, yaitu sebagai penyedia informasi yang dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan, sekaligus sebagai alat rasionalisasi kebijakan sehingga dapat diterima oleh publik.

Sedangkan, Berry (1990) berpikir sebaliknya. Media tidak begitu berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, juga tidak dapat dimanipulasi oleh pemerintah. Media dapat memainkan peran independen. Tugas utama media dalam pembuatan kebijakan luar negeri adalah untuk memberi informasi kepada pemirsa apa yang ingin dilakukan atau dihindari pemerintah (Majumdar dan Chatterjee, 2004: 359-362).

Teori Pengaruh Kebijakan

Dalam teori pengaruh kebijakan, William D. Coplin menganalisis hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri dengan pengambil keputusan kebijakan luar negeri. Aktor politik dalam negeri disebut Coplin sebagai *policy influencers* (yang memengaruhi kebijakan). Ada beberapa tipe *influencer* yang dimaksud Coplin, salah satunya adalah *mass influencer*, yang terwujud dalam opini publik yang dihentuk oleh media massa. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi pertimbangan bagi para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan luar negeri (William D. Coplin, 1992: 37 -42).

Media massa, dengan kemampuan jaringannya yang luas sehingga bisa menghimpun berbagai informasi di lapangan, termasuk di luar negeri, bisa menjadi sumber akurat bagi pemimpin (perumus kebijakan luar

negeri) untuk menganalisa kondisi internasional. Selain itu, media juga memiliki kemampuan membentuk opini publik dengan kepentingan yang ditanamkan dalam tiap tulisannya, misalnya dalam editorial, gaya pemberitaan, ataupun sisipan bias dalam artikel. Opini publik akan tecermin lewat media pula. Pembaca akan memberikan tanggapan melalui surat pembaca, tulisan mereka dalam kolom khusus opini, atau dalam hasil *polling* yang diadakan. Dari sini, pengambil kebijakan mendapatkan pengetahuan mengenai keinginan dan kehendak rakyatnya, dan itulah yang dijadikan pijakan bagi mereka untuk mengambil keputusan.

***News Corporations* sebagai Instrumen Pembuatan Kebijakan Luar Negeri**

News Corporations adalah salah sate konglomerasi media terbesar di dunia milik Rupert Murdoch. Jaringan dan distribusinya tersebar di seluruh penjuru dunia dan mampu menjadi alternatif utama di masing-masing kelas. Seperti *The Australia*, *The Weekly Australia*, dan *The Sunday Herald Sun* yang merupakan surat kabar terkemuka di Australia, *The Sun* sebagai koran utama Inggris, atau *The New York Post* yang bisa disejajarkan dengan *New York Times* di AS. Majalah *The Weekly Standard* adalah majalah politik terpendang di Washington. Begitu juga dengan program berita televisinya, *Fox News Channel*. Murdoch adalah pendukung rezim konservatif Bush dan Partai Republik. fa juga dikenal sebagai tokoh neokonservatif yang aktif mensponsori setiap kebijakan presiden melalui jaringan medianya ini.

Di AS sendiri, media memang memiliki potensi besar memengaruhi opini publik yang akhirnya menjadi *input* bagi presider' untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Ini tidak lepas dari masyarakat AS sendiri yang menjadikan media, terutama televisi dan surat kabar, sebagai gaya hidup dan kebutuhan. Terlebih lagi tayangan berita.

Ahli politik media Doris Graber menyatakan bahwa media merupakan sumber utama penduduk AS tentang semua hal yang terjadi di luar lingkungannya. Media massa benar-benar menjadi jendela dunia, dan menilik kebiasaan masyarakat yang cenderung memercayai apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka Baca, televisi kemudian menjadi bentuk utama dari "jendela dunia" tersebut.

Tidak hanya itu, secara teknis, media juga menyajikan informasi dengan sangat cepat dan dapat memenuhi kebutuhan publik atas informasi tersebut kapan saja. Kantor berita *Cable News Network* (CNN) menyiarkan tayangan berita 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Setiap menit memungkinkan untuk tersela *breaking news* yang memuat berita-berita darurat.

Sennia bentuk media massa memiliki pengaruh politik, karena kemampuannya menjangkau audiens yang luar biasa besar. Meski begitu, dampaknya bervariasi, tergantung dari karakteristik masing-masing, kualitas dan kuantitas pesan politis yang disampaikan, dan jangkauan audiens yang diperoleh. Media elektronik, televisi terutama, menyediakan citra realitas yang lebih besar, sehingga kita melihat bahwa televisi merupakan media yang lebih kredibel daripada media cetak (Graber *et.al.*, 1998).

Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan menonton televisi warga AS. Remaja lulusan SMU menghabiskan lebih banyak waktu di depan televisi ketimbang di sekolah persiapan (*college*). Bahkan di sekolah pun, analisis mengenai peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi juga didasarkan pada informasi yang diperoleh dari tayangan televisi. Orang dewasa menghabiskan setengah dari waktu santainya dengan menonton televisi. Mendengarkan radio dan membaca koran serta majalah ada di urutan berikutnya. Sedangkan para lansia, rata-rata menonton televisi tujuh jam sehari. Sebanyak 76 persen warga AS, berdasarkan survei tahun 2000 menyatakan mereka menonton berita dari televisi secara teratur, sementara 63 persen membaca surat kabar.

Konsumsi berita televisi AS dapat dilihat di bawah ini:

Pola Konsumsi Berita Televisi: 2000

Media	Presentase
Televisi Lokal	56%
<i>Nightly network news</i>	30%
CNN	21%
Fox News Cable	17%
CNBC	13%
MNSBC	11%
C-Span	4 [%]

Sumber:
Gruber (2000), adaptasi dari Pew Research Center for People and the Press, "Internet Sapping Broadcast News Audience," <http://www.peoplepress.org/mediuoosecr.htm>;
<http://www.peoplepress.org/mediuoosec2.htm> (13 Juni 2000)

Kembali ke kasus *News Corps*; sebelum perang, media ini tercatat paling gencar melancarkan "kampanye" untuk mendukung rencana Bush menginvasi Irak, baik melalui *Fox News*, surat kabarnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia, maupun majalah politiknya yang terkenal, *The Weekly Standard*. Misalnya, pembaca berita dan pembawa acara bincang-bincang (*talk show*) yang membicarakan masalah-masalah politik, Sean Hannity, dengan kemampuannya mengarahkan obrolan dengan narasumber selalu berhasil meyakinkan pemirsa bahwa Irak memang memiliki senjata pemusnah masal, dan secara implisit memaksa pemerintahan Bush untuk tidak menengundurkan niat menyerang Irak (Gray, 2002: 16-17).

Bukan saja di daratan Amerika Serikat, hampir semua media milik jaringan *News Corps* di negara koalisi AS menyajikan berita yang kurang lebih seragam, yaitu bahwa Irak memiliki *prototype* dan bahan baku cikal bakal senjata pemusnah masal yang disebut sebagai mengancam "keamanan dan perdamaian dunia". Ketika Blix memberikan laperan kepada Sidang Dewan Keamanan PBB pada 27 Januari 2003, editorial sebuah surat kabar Australia milik jaringan *News Corporations* menulis tentang Blix yang telah menyediakan bukti bahwa diktator Irak Saddam Hussein tetap mengembangkan senjata pemusnah masal. Kemudian, lanjut editorial itu, sangat penting untuk melucuti senjata Irak, kalau perlu memakai kekuatan militer (Pearce, 2006)

Blix segera mengklarifikasi bahwa ia dan timnya tidak menemukan bahan nientah ataupun fasilitas untuk membangun senjata pemusnah masal, dan ia terakhir kali mengadakan inspeksi pada hari Jumat pekan sebelumnya. Hari Jumat adalah hari suci umat Islam ketika para staf pejabat Irak absen dari pekerjaan dan beberapa pintu tertutup, tanda ada lubang kuncinya. Pihak Irak menawarkan untuk mendobrak pintu sembari merekam kegiatan inspeksi ini dalam video, tetapi Blix memilih melakukan inspeksi esok harinya. Detail seperti ini tidak akan kita ketahui dari media. Yang mereka katakan adalah Irak memiliki bahan baku senjata pemusnah masal dalam jumlah besar yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan.

Selain media yang ramai dengan pemberitaan mengenai kepemilikan senjata pemusnah masal Irak, Channel 4, BBC, dan ITN mengatakan bahwa AS perlu mendemokratiskan Irak dengan jalan menjatuhkan rezim diktator Sadam. Cara militer tidak menjadi masalah (www.ccmeep.org, 3 November 2006). Majalah *The Weekly Standard*,

melalui editornya, William
berisi 40 (empat puluh) buah

Kristol menyerahkan surat petisi
tanda tangan penulis opini di

majalahnya, bahwa keterlibatan militer untuk masalah Irak memang mutlak diperlukan. Seperti dilaporkan *The Guardian*, ketika AS mendeklarasikan invasi ke Irak, Murdoch mengatakan bahwa Bush telah mengambil tindakan yang sangat tepat dan bermoral, sementara Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang mendukung operasi militer itu sebagai 'pria yang gagah berani' (www.americanprogress.org. 3 November 2006).

Dengan gencarnya kampanye perang *News Corps* ini, tidak mengherankan bila kemudian publik mulai percaya bahwa Irak memang memiliki senjata pemusnah masal dan memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan teroris Al Qaeda. Sebuah studi berdasarkan serangkaian jajak pendapat mengungkapkan bahwa sebelum invasi Irak dilaksanakan, warga telah memiliki persepsi yang keliru tentang Irak, dan ini membuat dukungan terhadap invasi meningkat (www.worldpublicopinion.org, 22 Februari 2007)

Jajak pendapat yang dilakukan oleh *The Program on International Policy* di Universitas Maryland dan *Knowledge Networks* juga menemukan bahwa persepsi yang keliru pada warga AS ini sangat dipengaruhi oleh sumber berita utama tiap individu. Mereka yang menonton *Fox News* kebanyakan salah mempersepsikan apa yang terjadi di Irak dibanding mereka yang menonton NPR atau PBS.

Analisis mendalam terhadap jajak pendapat sejak Juni hingga September 2004 menunjukkan bahwa 48 persen percaya bahwa Irak memiliki hubungan erat dengan AI-Qaeda, 22 persen percaya senjata pemusnah masal dapat ditemukan di Irak, dan 25% mengira dunia mendukung rencana invasi AS ke Irak. Secara keseluruhan, 60 persen warga AS punya salah satu dari tiga persepsi ini.

Persepsi ini yang secara signifikan meningkatkan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Warga yang tak memiliki satu pun dari tiga persepsi ini, hanya 23 persen yang mendukung perang. Sementara, mereka yang memiliki hanya satu persepsi ini dalam pikirannya, 53 persen mendukung perang, naik menjadi 78 persen untuk mereka yang memiliki 2 persepsi, dan 86 persen bagi mereka yang memiliki ketiga persepsi yang keliru tersebut (www.worldpublicopinion.org, 22 Februari 2007).

Persepsi kunci lain adalah bahwa Irak terlibat dalam serangan 11 September 2001. Sebelum perang, sekitar satu dari lima orang percaya pada keterkaitan Saddam dengan serangan 9/11, dan 13 persen bahkan menyatakan bahwa mereka telah melihat buktinya. Berdasarkan

polling periode Juni-September 2003, prosentase warga yang percaya bahwa Irak secara langsung terlibat 9/11 selalu berkisar antara 20-25 persen, sedangkan 33-36 persen lainnya mengatakan bahwa Irak memang menjadi pendukung substansial Al Qaeda.

Jajak pendapat berikutnya menunjukkan dengan jelas bahwa ketiga persepsi di atas kemudian memengaruhi dukungan terhadap Bush untuk menyerang Irak. Bulan Februari 2003, di antara mereka yang percaya Irak terlibat tindak terorisme 9/11, 58 persen menyatakan bahwa mereka setuju dengan keputusan Presiden Bush untuk berperang, bahkan tanpa izin PBB. Mereka yang percaya Irak mendukung Al Qaeda, tetapi tidak terlibat 9/11, 37 persen setuju dengan Bush. Bagi yang percaya bahwa para petinggi Al Qaeda punya kontak individual dengan pemimpin Irak, 32 persen mendukung pemerintah AS. Bagi warga AS yang mengira bahwa penduduk dunia lain juga setuju dengan keputusan Bush, 81 persen ikut mendukung presiden mereka. Sementara, bagi yang mengetahui reaksi negara lain yang menentang invasi, hanya 28 persen yang setuju AS maju perang. Dari kesalahan persepsi ini, tidak dapat dikatakan bahwa rakyat AS tidak memerhatikan berita. Bahkan, yang sangat memerhatikan berita pun tidak luput dari persepsi yang keliru ini. Masalah masih terletak pada media yang mereka pilih untuk menjadi sumber utama mereka. Mereka yang menonton Fox, yang paling tinggi intensitasnya, justru yang paling banyak memiliki kesalahan persepsi. Warga yang menggunakan media cetak sebagai sumber utama, kesalahan persepsinya lebih kecil. Berdasarkan hal itu, tampak jaringan media AS *News Corporations*, terutama program berita *Fox News*, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembuatan keputusan kebijakan Bush untuk melancarkan invasi terhadap Irak pada Maret 2003.

Kesimpulan

Dengan melihat data-data di bagian sebelumnya, terlihat bahwa *News Corps*, sebagai jaringan berita yang menjadi sumber berita utama sekitar satu per lima penduduk AS berhasil membentuk opini pembaca dan pemirsanya dengan menyodorkan berita-berita bahwa Irak memang memiliki senjata pemusnah massal, memiliki kaitan dengan jaringan teroris internasional Al Qaeda, dan bahwa rezim Saddam Husein memang pantas ditumbangkan dengan kekuatan militer. Dengan berita semacam ini, publik jadi terdorong untuk memberikan persetujuan kepada presiden mereka untuk menyerang Irak meski

rencana ini ditentang keras Uni Eropa, negara-negara Asia dan Timur Tengah, bahkan PBB.

Kasus ini menjadi contoh yang menarik untuk menjelaskan teori Naveh dan Berry bahwa media dapat memainkan peran aktif sekaligus pasif dalam pembuatan kebijakan luar negeri. *News Corps*, sebagai perusahaan media yang menjadi pendukung setia pemerintahan Bush dengan gencar melakukan kampanye mendukung perang, baik melalui editorial di majalah *The Weekly Standard* maupun pembawa acara di *Fox News*, dan di tajuk rencana koran-korannya yang tersebar di penjuru AS. Di sini, media menjadi pemain aktif.

Sementara itu, berita mereka yang dijadikan sumber utama rakyat AS pada aldairnya mampu membentuk opini publik. Dalam hal ini, media memainkan peran pasif, yaitu hanya sebagai *input* bagi publik. Nantinya, *input* itu mengalami proses pengolahan sendiri pada masing-masing individu sehingga *output* yang berupa sikap atau tindakan akan berbeda, meski sama-sama mengonsumsi berita dari Fox dan anak-anak perusahaan *News Corps* lainnya.

Daftar Pustaka

- Chomsky, Noam. et al., "Corporate Media," www.countereurrents.org , 22 Oktober 2006.
- . "The Corporate War Press," www.ccmep.org , 27 Maret 2003.
- "Who is Rupert Murdoch," www.americanprogress.org , 16 Juli 2004.
- . World Public Opinion, "Misperception, the Media, and the Iraq War", www.publicopinion.org , 22 Februari 2007.
- Coplin, William D. 1992. Marsedes Marbun (Terj.) *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis*. Edisi Kedua. Bandung: Sinai' Baru.

- Evans, Grahams dan Jerry Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: The Penguin Group.
- Graber, Doris A. 1998. *The Politics of News*. Washington: CQ Press.
- Graber, Doris A. 2002. *Media Power in Politics*. Washington: CQ Press.
- Gray, Jerry D. 2006. *Dosa-dosa Media Amerika*. Jakarta: Ufuk Press.
- Mahally, Abdul Halim. 2003. *Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat, Jakarta*: Pustaka Sinar Harapan.
- Majumdar, Anindyo J. et al. 2004. *Understanding Global Politics: Issues and Trends*. New Delhi: Lancer's Books.
- Mujani, Saiful. "Jajak Pendapat Publik Membantu Demokrasi Bekerja," www.lsi.or.id , 1 September 2004.
- Naveh, Chanan. "The Role of The Media in Foreign Policy Decision Making Process: A Theoretical Framework," www.cco.regener-online.de ,12 November 2002.
- Nimmo, Dan. 2004. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pearce, Rohan. "Irak: How the Corporate Media Promotes War," www.countercurrents.org , 15 Februari 2006.